

**KAJIAN PARTISIPASI PETANI  
DALAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
(Studi Kasus di Desa Tegarwaru, Kecamatan Ciampea,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat)**

Oleh:  
**Wardani<sup>1</sup> dan Kusnadi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen STPP Bogor, Jurusan Penyuluhan Peternakan  
<sup>2</sup>Mahasiswa STPP Bogor, Jurusan Penyuluhan Peternakan

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyuluhan, mengetahui apakah program penyuluhan saat ini diterapkan berpengaruh terhadap prakarsa dan partisipasi petani dan mengetahui pendekatan penyuluhan pertanian yang mungkin dapat diterapkan agar petani dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti yang diharapkan. Hasil pengkajian ini dapat disimpulkan tingkat partisipasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian sebagian besar pada kategori sedang dengan kisaran 62,2% - 86,5%. Dalam penyusunan program penyuluhan pertanian partisipasi petani sudah mulai aktif berpartisipasi dalam menyiapkan data-data, merumuskan masalah yang dihadapi petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dengan adanya partisipasi petani dapat meningkatkan kemampuan petani dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Partisipasi, petani, penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

**PENDAHULUAN**

**Latar belakang**

Penyuluh pertanian sebagai salah satu agen pembaharu dan berada pada garis terdepan dalam akselerasi pembangunan agribisnis di Indonesia, diharapkan mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang tinggi dalam menyelenggarakan tugas pokoknya yaitu membantu petani meningkatkan kualitas dirinya melalui perubahan pengetahuan keterampilan dan sikap ke arah yang diharapkan.

Penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu pendidikan nonformal yang tidak hanya sekedar memberikan penerangan atau penjelasan, tetapi berupaya untuk

mengubah perilaku seseorang agar memiliki pengetahuan pertanian, pengetahuan berusaha, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovasi terhadap in formasi, serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Penyuluhan partisipatif ialah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama, yakni petani sebagai subyek pembangunan dan pelaku usaha dalam penyuluhan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar petani mampu mengambil keputusan secara mandiri terhadap apa dan mengapa yang dilakukannya dengan harapan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis akan dapat terwujud.

Azas Penyuluhan Pertanian, UU RI No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 2 menyatakan bahwa penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Tujuan penyuluhan pertanian, UU RI No 16 Tahun 2006 Pasal 3, menyatakan bahwa tujuan pengaturan system penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu :

1. Mamperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam system pembangunan berkelanjutan;
2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitas;
3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswastaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
5. Mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Fungsi penyuluhan pertanian UU RI No 16 Tahun 2006 Pasal 4, menyatakan bahwa fungsi system penyuluhan meliputi :

1. Mamfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Memabantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang pelaku utama dan pelaku usahadalam mengelola usaha;
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Partisipasi memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih besar dalam cara berfikir manusia. Perubahan dalam pemikiran dan tindakan akan lebih sedikit terjadi dan perubahan-perubahan ini tidak akan bertahan lama jika mereka menuruti saran-saran agen penyuluhan dengan patuh daripada bila mereka ikut bertanggung jawab.

Pendekatan partisipatif dianggap perlu dalam diskusi dengan berbagai metode pendekatan, maka dapat diketahui kapan saatnya agen penyuluhan dapat memberitahu petani mengenai apa yang harus mereka lakukan dan kapan saatnya mereka harus berusaha menciptakan situasi agar petani menemukan pemecahannya sendiri.

### Rumusan Masalah

Pembangunan pertanian dan penyelenggaraan, penyuluhan pertanian di Indonesia yang cenderung mementingkan keproyekan daripada kepentingan petani, memberi dampak pada menurunnya prakarsa (*initiative*) dan partisipasi petani yang merupakan salah satu elemen proses pembangunan masyarakat, masalah yang timbul, asumsi penyebabnya, serta pengaruhnya dapat ditunjukkan dengan analisis pohon masalah (Problem Tree Analisis).

Dengan demikian, agar petani dalam pembangunan pertanian mampu dan mau memberikan kontribusinya, maka pembangunan pertanian tersebut harus didasarkan pada prakarsa mereka sendiri, kemampuan mengambil keputusan untuk alternative pilihan dalam pemenuhan kebutuhannya, mengelola dan memberdayakan secara optimal potensi dan sumberdaya yang dimilikinya merupakan hal yang harus diupayakan secara serius.. Dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat menuju pertanian yang mandiri dan tangguh (masyarakat yang bermanfaat) maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi petani saat ini dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian saat ini di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi agar petani dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti yang diharapkan.

### Tujuan

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi tentang pendekatan penyuluhan apa yang sebaiknya dan memungkinkan untuk diterapkan dalam meningkatkan kadar prakarsa (*initiative*) dan partisipasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Tujuan yang ingin diketahui dari pengkajian ini adalah:

1. Mengkaji tingkat partisipasi petani saat ini dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian saat ini di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi..
2. Mengkaji apakah program penyuluhan saat ini diterapkan di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap prakarsa dan partisipasi petani.
3. Merekomendasi pendekatan penyuluhan yang memungkinkan dapat diterapkan agar petani dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti yang diharapkan.

### METODE KAJIAN

Kajian ini dilaksanakan dengan metode survai, analisa data dilakukan secara deskriptif dengan analisis kuantitatif dikombinasikan dengan metode kualitatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pendekatan penyuluhan yang baik untuk dapat diterapkan spesifik setempat.

Kajian deskriptif (*descriptiuf research*) dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat. Penelitian deskritif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena secara akurat. Untuk mengetahui partisipasi petani dalam bekerja sama untuk melaksanakan program penyuluhan pertanian, menghadiri rapat-rapat dalam kelompoktani, mendemonstrasikan metode baru untuk usahatani, mengorganisasikan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

### Responden Kajian

Sesuai dengan kajian, maka responden utama dari kajian ini adalah petani yang terdiri atas: 1) Wakil petani

(kontak tani), 2) Petani anggota kelompok-tani. Populasi responden kajian sebanyak 37 (kontak tani: 1 orang, Pengurus: 6 orang dan petani anggota 30 orang), data kuantitatif dikumpulkan dari semua responden sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan untuk responden. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam adalah mengenai motivasi petani dan system sosial di masyarakat yang bersangkutan.

#### **Taknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah Analisis Semantic Differential. Indikator yang dibuat dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan bisa diedarkan atau ditanyakan langsung kepada petani sehingga akan menjawab informasi pokok tentang:

1. Informasi kebutuhan, di sini dinyatakan perihal menemukan kebutuhan petani dengan skor sebagai berikut : sangat mampu dengan skor (5), mampu (4), cukup bisa (3), tidak mampu (2) dan sangat tidak mampu (1).
2. Informasi keadaan saat ini yang menyatakan keadaan riil petani saat ini dengan skor sebagai berikut, sangat bisa (5), bisa (4), cukup bisa (3), tidak bisa (2), dan tidak bisa sama sekali (1).

#### **Metode dan Prosedur Analisis Data**

Data yang diperoleh dari responden kemudian ditabulasi dan dianalisis menggunakan statistic deskriptif seperti frekuensi, presentase, rata-rata dan standar deviasi. Analisis kuadran digunakan untuk menetapkan pentingnya peningkatan partisipasi petani, prosedur yang digunakan adalah:

- a. Menghitung rerata untuk masing-masing variable partisipasi petani
- b. Menentukan tempat rerata pada suatu sumbu Y untuk kebutuhan dan X untuk keadaan saat ini, dari penentuan tersebut dihasilkan 4 kuadran
- c. Rerata dari kebutuhan dan keadaan saat ini untuk masing-masing pernyataan di

dalam masing-masing bagiannya ditentukan tempatnya dalam grafik

Sebagai hasil dari metode dan prosedur di atas, keempat kuadran diberi label sebagai berikut:

- a. Higt Level Successful Abalities (HLSA) yaitu kondisi di mana kebutuhan dan keadaan saat ini tinggi. Kuadran ini sering juga digambarkan sebagai kuadran 1.
- b. Low Level Successful Abalities (LLSA) yaitu kondisi dimana kebutuhan terletak pada level rendah dan keadaan saat ini tinggi.
- c. Low Level Needs (LLN) yaitu kondisi dimana kebutuhan dan keadaan saat berada pada level rendah.
- d. Criticaal Needs (CN) yaitu berarti kebutuhan tinggi, tetapi keadaan saat ini rendah.

Kebutuhan akan peningkatan partisipasi petani selanjutnya dapat diidentifikasi baik untuk kategori kebutuhan level rendah sampai dengan kebutuhan penting (CN). Analisis factor digunakan dengan mendiskripsikan factor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat partisipasi petani saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadaan Wilayah**

Wilayah binaan Tegal Waru secara administrative berada di Kecamatan Ciampe, terletak di sebelah barat kota Bogor dengan jarak 37 km dari ibukota Kabupaten. Luas wilayah Desa Tegal Waru adalah seluas 412,9 Ha.

### **Potensi Sumberdaya Alam**

Bentang lahan wilayah binaan Tegal Waru daratan : 367,5 Ha, perbukitan : 45,4 Ha. Kemiringan lahan berkisar 5 – 8 % dengan ketinggian tempat berada 125 m di atas permukaan laut, drainase baik, secara

umum tanahnya termasuk jenis Latosol dengan pH berkisar antara 4 – 6.

**Data Kuantitatif**

Data kuantitatif diperoleh dari wawancara terstruktur kepada 37 orang responden terpilih dengan menggunakan kuesioner. Responden diminta menentukan tingkatan (rate) menggunakan Skala Likert 5 poin. Kuesioner dibuat dalam bentuk skala likert sehingga akan menjawab informasi tentang kemampuan saat ini dan kebutuhan, dengan pengukur sangat dibutuhkan (5) dan sangat tidak dibutuhkan (1); dan untuk kemampuan: sangat tidak mampu (1) sampai dengan sangat tidak mampu.

**Analisis Data**

Data dari responden kemudian diolah dengan menggunakan statistic deskriptif yang mencakup rata-rata dan standar deviasi. Hasil olahan data ini selanjutnya digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan analisis kuadran, yang bertujuan untuk menetapkan pentingnya peningkatan petani berdasarkan nilai yang didepresikan petani atas kebutuhan dan keadaan saat ini.

Prosedur yang digunakan untuk analisis kuadran ini adalah:

- a. Menghitung rata-rata untuk masing-masing variabel partisipasi petani
- b. Menentukan kordinat nilai rata-rata sumbu X untuk keadaan saat ini dan sumbu Y untuk kebutuhan

Pengkajian partisipasi petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ciampea terhadap 37 responden diperoleh nilai rata-rata kebutuhan dan keadaan saat ini masing-masing 2,39 dan 2,97.

**Partisipasi Petani dalam Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian**

Seiring dengan adanya pardigma penyuluhan pertanian, maka sedikit demi sedikit dapat dirasakan partisipasi petani dalam penyusunan program penyuluhan, meskipun dalam kadar yang sangat sedikit. Hal ini jauh lebih baik dari pada tidak melibatkan petani sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden mengenai program penyuluhan pertanian diperoleh rata-rata skor kebutuhan adalah 2,93 dan kepentingan (keadaan saat ini) 2,97.

Tabel 1. Nilai rata-rata dari seluruh responden terhadap program penyuluhan pertanian

No	Pertanyaan	Kebutuhan	Kepentingan
1	Pengetahuan potensi sumberdaya	3,03	3,14
2	Kemampuan menganalisis keadaa yang diharapkan	2,89	3,00
3	Kemampuan mengidentifikasi masalah yang ada	2,81	2,78
4	Kemampuan mengelompokan masalah yang harus dipecahkan	2,89	2,92
5	Kemampuan merupmuskan tujuan berdasarkan prioritas kebutuhan	3,05	3,03
Rata-rata		2,93	2,97

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata kelima pertanyaan menunjukkan tingkat kebutuhan lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kepentingan yang tinggi (keadaan saat ini).

#### **Pengetahuan potensi sumberdaya**

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai tingkat kebutuhan adalah 3,03 dan nilai kepentingan (keadaa saat ini) adalah 3,14, dengan demikian maka kondisi ini perlu tetap dipertahankan karena berada pada kuadran A yaitu penting bagi petani untuk mengetahui potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya yang harus diketahui oleh petani meliputi 5 M (Man, Methode, Money, Machine, dan Market), pengetahuan tentang sumberdaya ini tentunya mendukung partisipasi petani dalam merencanakan program penyuluhan pertanian.

#### **Kemampuan menganalisis keadaan yang diharapkan**

Sebagian besar petani, tidak mampu menganalisis keadaan sebenarnya yang diharapkan oleh petani sebagai individu hanya terbatas terpenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh nilai rata-rata kebutuhan adalah 2,89 dan nilai kepentingan adalah 3,00, dimana kebutuhan dan kepentingan yang sedang maka dalam hal ini masuk dalam prioritas sedang.

#### **Kemampuan mengidentifikasi masalah yang ada**

Permasalahan yang timbul di desa Tegal Waru, pada umumnya hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi secara nasional, yaitu kemampuan kelompok petani masih rendah, sulitnya akses pasar dan informasinya, timbulnya regenerasi hama dan penyakit, dan kelembagaan penyuluhan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Nilai rata-rata berdasarkan wawancara, untuk kebutuhan diperoleh 2,81 dan kepentingan 2,78, dimana dibutuhkan oleh petani dan kepentingannya yang rendah maka hal ini termasuk prioritas rendah menurut petani. Dalam kenyataannya, permasalahan tersebut merupakan prioritas yang harus diutamakan.

#### **Kemampuan mengelompokkan masalah yang harus dipecahkan**

Seperti telah dijelaskan, petani telah mampu mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi sangat sedikit petani yang dapat mengelompokkan masalah tersebut, apakah termasuk dalam kategori gawat, mendesak dan bagaimana penyebarannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa nilai kebutuhan petani adalah 2,89 dan 2,92 untuk nilai kepentingan. Artinya tidak penting menurut petanidan kepentingan petani di dalamnya rendah maka termasuk dalam prioritas rendah menurut petani.

#### **Kemampuan merumuskan tujuan berdasarkan prioritas kebutuhan**

Berdasarkan hasil wawancara, nilai rata-rata kebutuhan petani adalah 3,05 dan kepentingan 3,03. artinya kebutuhan dan kepentingan petani sedang, yang diimplikasi dipertahankannya kegiatan tersebut.

#### **Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian**

Penyusunan rencana penyuluhan pertanian selanjutnya diimplikasikan di lapangan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dicapai sesuai program yang telah disusun. Pelaksanaan program penyuluhan, sebenarnya merupakan area kerja petani sepenuhnya. Artinya, partisipasi petani dalam hal ini harus mendapat prioritas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebutuhan dan kepentingan petani dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai rata-rata seluruh responden terhadap pelaksanaan program penyuluhan pertanian

No	Pertanyaan	Kebutuhan	Kepentingan
1	Keaktifan menghadiri pertemuan penyuluhan kelompoktani	3,14	3,03
2	Keaktifan dalam setiap pertemuan	3,22	3,11
3	Keaktifan menghadiri rapat-rapat penyuluhan di BPP	3,49	2,46
4	Keaktifan dalam merencanakan jadwal penyuluhan	2,54	2,65
5	Keaktifan dalam membantu penyuluh untuk mempersiapkan tempat, alat, dan bahan yang diperlukan dalam menyelenggarakan penyuluhan di kelompoktani	2,92	3,00
Rata-rata		2,86	2,85

Pada tabel tersebut di atas, menjelaskan bahwa lima pertanyaan tersebut menunjukkan tingkat kepentingan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kebutuhan petani. Tingkat kepentingan petani adalah 2,85 dan tingkat kebutuhan petani adalah 2,86.

#### **Partisipasi Petani dalam Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian**

Evaluasi merupakan bagian terakhir dari proses manajemen yang baik. Evaluasi

program penyuluhan dapat dijadikan acuan untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Partisipasi selama ini dalam evaluasi program masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat minimnya pembiayaan pada sector in.

Hasil wawancara dalam hal kebutuhan dan kepentingan petani dalam evaluasi program penyuluhan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Nilai rata-rata responden terhadap evaluasi program penyuluhan pertanian

No	Pertanyaan	Kebutuhan	Kepentingan
1	Kemampuan mengevaluasi program penyuluhan pertanian yang sudah dijalankan	3,14	3,03
2	Kemampuan penilaian terhadap program penyuluhan pertanian	3,22	3,11
3	Kemampuan menyimpulkan dari hasil penilaian terhadap program penyuluhan pertanian yang sudah dilaksanakan	2,49	2,46
4	Merasakan manfaat terhdap program penyuluhan	2,54	2,65
5	Merasakan peningkatan pendapatan dari program penyuluhan yang telah dilaksanakan	2,92	3,00
Rata-rata		2,80	2,85

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai kepentingan petani lebih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan petani. Nilai rata-rata kepentingan petani adalah 2,85 dan nilai rata-rata kebutuhan petani adalah 2,86.

Untuk menentukan apakah partisipasi petani tersebut masuk ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi, maka dilakukan analisis standar deviasi. Rumus yang digunakan adalah rumus sebaran/distribusi normal

seperti yang tercantum di dalam Agresti, *Statistical Method For The Social Sciences*, 1999. adapun pencabarannya adalah sebagai berikut:

Kategori Rendah =  $X < (X - Sd)$

Kategori Sedang =  $(X - Sd) < X < (X + Sd)$

Kategori Tinggi =  $X > (X + Sd)$

Klasifikasi partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Klasifikasi partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan pertanian

No	Kegiatan	Kategori	N	Persentase	Kisaran	Rata-rata
1	Perencanaan penyusunan program penyuluhan pertanian	Rendah < 2	2	5,4	1 – 5	3,05
		Sedang 3 – 4	32	86,5		
		Tinggi > 4	3	8,1		
2	Pelaksanaan program penyuluhan pertanian	Rendah < 2	12	32,4	1 – 5	2,84
		Sedang 3 – 4	32	62,2		
		Tinggi > 4	2	5,4		
3	Evaluasi program penyuluhan pertanian	Rendah < 2	5	13,5	1 – 5	3,08
		Sedang 3 – 4	27	73,0		
		Tinggi > 4	5	13,5		

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar partisipasi petani berada pada kategori sedang, dengan kisaran persentase terletak pada 62,2% - 86,5%. Artinya saat ini partisipasi petani sudah menunjukkan grafik peningkatan. Yang perlu dicermati di sini adalah adanya petani yang tingkat partisipasi tinggi. Golongan petani ini adalah golongan intelektual petani dan merupakan promotor pembangunan pertanian di Desa Tegal Waru. Golongan ini terdiri dari para kontak tani dan petani yang berpendidikan tinggi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari hasil pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi petani di Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penyuluhan pertanian sebagian besar terletak pada kategori sedang, dengan kisaran persentase 62,2% - 86,5%.
2. Program penyuluhan pertanian yang disusun di Kecamatan Ciampea dalam bentuk program penyuluhan pertanian sedikit banyaknya telah memberikan prakarsa kepada petani, sehingga secara bertahap petani mulai menunjukkan

- partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
3. Dengan semakin tingginya tingkat partisipasi petani, maka model penyuluhan yang tepat diterapkan di Desa Tegal Waru adalah model penyuluhan Partisipatif yang lebih mengedepankan peran petani dan memperbesar porsi pengambilan keputusan petani itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syamsuddin 1995. *90 Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia*. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Adjid, Dudung A. 1986. *Pada Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Berencana*. Orba Shakti, Bandung.
- Chambers, Robert. 2001. *PRA, Memahami Desa secara Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sekretaris Negara. 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.